



# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN KEBERSIHANDI KOTA KEDIRI

Yenik Pujowati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*Email : yeniworo@gmail.com*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kebijakan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan persampahan di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri. Berdasarkan undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kebijakan peraturan daerah No.3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri. Berdasarkan peraturan tersebut sangatlah penting untuk menguatkan tentang pelayanan kebersihan persampahan di Kota Kediri. Metode penelitian ini yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data di peroleh melalui observasi dan analisis dari data sekunder, maupun data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah indikator kinerja pelayanan kebersihan pada sapuan jalan masih kurang efisien dan teknis kerja sapuan jalan masih kurang produktif, sebagai pendukung sarana prasarana alat pengangkutan sampah atau pengambilan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA masih kurang maksimal, hal ini di sebabkan keterbatasan peralatan di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri. Dari hasil peneliti dapat di simpulkan bawah kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan kebersihan di Kota Kediri belum mencapai standar kinerja dan tingkat pelayanan kebersihan belum bisa dikatakan secara efisien dan efektif.

**Kata Kunci :** *Kinerja Kebijakan Publik, Pelayanan Kebersihan Sampah.*

## Abstract

This research aims to determine the performance of local government policies in improving solid waste services in the environmental cleanliness and gardening service of Kediri city. Based on Law No.18 of 2008 concerning waste management, regional regulation policy No. 3 of 2015 concerning waste management in Kediri City. Based on this regulation, it is very important to strengthen solid waste cleaning services in Kediri City. This research method used is a qualitative research method. Data is obtained through observation and analysis from secondary data and primary data. The results of this study indicate that the performance indicators of cleaning services on road sweeping are still less efficient and the technical work of road sweeping is still less productive, as a support for the infrastructure for waste collection equipment or waste collection from TPS / TPS 3R to TPA is still not optimal, this is due to limitations equipment in the environmental cleanliness and gardening service of Kediri City. From the results of the researchers, it can be concluded that the local government policy in improving the performance of cleaning services in Kediri City have not reached performance standards and the level of cleaning services cannot be said to be efficient and effective.

**Keywords :** *Public Policy Performance, Garbage Cleaning Services*



## LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Aparatur pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta mempunyai inisiatif dan empati di dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya. Perubahan paradigma pengelolaan persampahan akan sangat terkait dengan perubahan budaya pada masyarakat. Perubahan tersebut merupakan tantangan besar bagi pengelola kebersihan. Dalam kenyataannya banyak pengelola kebersihan menghadapi berbagai masalah dalam mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang menekankan pada pengurangan dan pemanfaatan sampah. Permasalahan pengelolaan sampah meliputi, aspek kelembagaan, teknik operasional dan peran serta masyarakat. Aspek kelembagaan disini adalah dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri (DLHKP). Kinerja pelayanan kebersihan Kota Kediri dalam meningkatkan kinerja pegawai dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri berdampak kepada aspek lainnya yaitu proses teknik operasional pengelolaan sampah yang kurang optimal dan peran serta masyarakat yang kurang efektif dan efisien.

Teknik operasional pengelolaan sampah yang menjadi tugas dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri. Kinerja pelayanan kebersihan dikota kediri adalah berhubungan dengan proses penyapuan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Terkait dengan teknik operasional pengelolaan sampah, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kinerja kurang optimal sehingga proses pengelolaan sampah menjadi terganggu adalah berkaitan dengan proses pengangkutan sampah dari tempat-tempat pembuangan sampah

sementara. Alat Pengangkutan sampah dikota kediri tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan yang seharusnya dilakukan 1 hari sekali, namun pada realitanya pengangkutan sampah hanya dilakukan dalam waktu 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali sampai 4 hari dan seringkali sampah-sampah tidak tiap hari diangkut. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DLKHP masih kurang dan DLHKP telah menganggarkan 24 unit gerobak sampah, pada tahun 2018 sebanyak 21 unit tossa (berumur lebih dari 10 tahun) yang dimiliki DLHKP. Ketersediaan dump truck dan arm roll yang memadai sebagai alat pengangkutan sampah juga sangat dibutuhkan untuk mengangkut sampah dari transfer depo atau container menuju TPA Klotok, 12 unit dump truck 6 unit arm roll dioperasikan untuk mengangkut sampah dari TPS/TPS3R/UDPK ke TPA yang berlokasi di Klothok Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah truk pengangkut sampah yang kurang memadai untuk dioperasikan dalam proses pengelolaan sampah. 65% alat pengangkutan telah dioperasikan lebih dari 15 tahun dan kondisi kendaraan saat ini rusak dan tidak efisien untuk dioperasikan. Hal-hal yang demikian tersebut menyebabkan lambatnya pelayanan pengangkutan sampah di tempat-tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), sehingga menyebabkan timbulan sampah. Permasalahan selanjutnya adalah mengikat pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, pemerintah, perdagangan dan jasa, serta konservasi yang setiap hari terus terjadi aktivitas sehingga sampah yang dihasilkan terus bertambah banyak dan lebih besar dibanding dengan daerah lainya walupun penyampuan di ruas-ruas jalan sepanjang kota kediri telah dilakukan namun sampah masih terus bermunculan diruas-ruas jalan. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan gambaran umum yang menghambat kinerja pelayanan kebersihan di dinas lingkungan hidup



kebersihan dan pertamanan kota kediri. Berdasarkan uraian diatas mengenai kinerja pelayanan kebersihan yang terjadi dikota kediri, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji lagi secara mendalam mengenai problematika sampah yang terjadi di kota kediri. oleh karena itu judul penelitian ini adalah "Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri".

## KAJIAN PUSTAKA.

### Kebijakan publik.

Definisi kebijakan publik juga dilakukan oleh Thomas R Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Makna Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisist merupakan kebijakan. Sealain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (*penjabat, kelompok, instansi pemerintah*) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan publik memang tidak lepas dari kaitan kepetingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Anderson, 1979:2-3)

Lain lagi dengan Edward yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"What government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs"*. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintahan ataupun berupa program-

program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Thoaha; 2002)

Selanjutnya kebijakan menurut (William N.Dunn: 1998) bahwa analisis kebijakan adalah; Policy analysis is a problem solving discipline that draws on theories, methods, and substantive findings of the behavioral and social sciences, social professional and political philosophy, as is usual with complex activities there are several ways to define policy analysis. The one adopted here is that policy analysis is a process multi-disciplinary inquiry designed to create, critically assess, and communicate information that is useful in understanding and improving policies. (Ricka; Journal of Urban Sociology/Volume 2/No.1/April 2019).

### Kinerja Kebijakan Publik.

Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program atau proyek. Fungsi indikator untuk mengetahui kinerja suatu kebijakan dapat dilihat dari definisi sebagai berikut :

*"Performance indicator are measure of project impact, outcome outputs, and inputs that are monitored during project implementation to assess progress toward project objectives. They are also used later to evaluate a project's succes". (World Bank, 1996 dalam bukunya Purwanto 2012:102)*

Dalam bukunya (Purwanto, 2015:105) Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka logis pengukuran kinerja suatu kebijakan, bawah indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua antara lain;

1. Indikator (*Policy Output*).



digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk mengetahui kualitas *policy output* yang diterima oleh kelompok sasaran, maka evaluator dapat merumuskan berbagai indikator.

## 2. Indikator *Policy Outcome*.

Indikator kedua adalah *Policy Outcome*, yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur, indikator outcome juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan (*Policy Impact*). Berbagai perubahan yang muncul sebagai konsekuensi implementasi suatu kebijakan atau program tersebut perlu diukur untuk dapat diketahui sejauh mana kinerja implementasi kebijakan atau program.

## Kinerja Pelayanan Publik

Produk organisasi publik adalah pelayanan publik. Karenanya produk pelayanan yang berkualitas menjadi tuntutan pemberi pelayanan. Gibson, Ivancevich & Donnelly (Depdagri, 2006:29-30) memasukkan dimensi waktu, yaitu menggunakan ukuran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam melihat organisasi publik. Dalam hal ini kinerja pelayanan publik terdiri dari:

1. Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan.
2. Mutu, adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan clients.
3. Efisiensi, adalah perbandingan terbaik antara keluaran (output) dan masukan (input)
4. Fleksibilitas, adalah usuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal.

1. Kepuasan menunjukkan pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan dan peran mereka didalam organisasi.
2. Persaingan menggambarkan posisi organisasi di dalam berkompetisi dengan organisasi
3. lain yang sejenis.

Pengembangan, adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan tanggungjawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang melalui investasi sumberdaya.

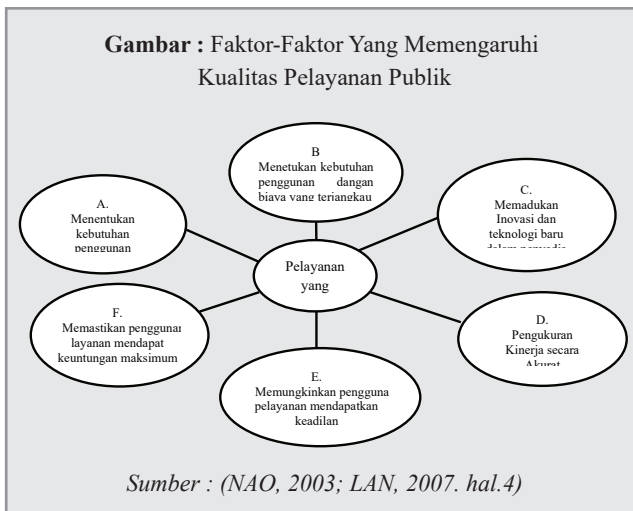
Kelangsungan hidup, adalah kemampuan organisasi untuk tetap eksis dalam menghadapi segala perubahan.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. (Mahsun, 2016:73) Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan kompone sebagai berikut :

1. Biaya pelayanan (*cost service*)
2. Penggunaan (*utilization*)
3. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standard*)
4. Cakupan pelayanan (*coverage*)
5. Kepuas (*satisfaction*)

Pengukuran kinerja pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia didasarkan atas berbagai kondisi dan situasi yang memungkinkan semuanya berjalan dengan baik. LAN (2007) menggambarkan secara teoritik bahwa kualitas pelayanan pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penentu apakah pelayanan itu baik atau buruk. Berikut ini gambar diagram faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik.

## Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pelayanan Publik



## METODE

Lokasi Penelitian bertempat di Kota Kediri Jawa Timur. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data di peroleh melalui observasi dan analisis dari data sekunder. Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, Kemudian di Analisis dan di interprestasikan dengan memberi kesimpulan. Tujuan peneliti untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Fokus masalah pada penelitian ini adalah kinerja pelayanan kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Informan pada peneliti ini adalah: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, Anggota bank sampah, Kepala desa dan Tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW di Kota Kediri.

### Dukungan Petugas Sapuan Jalan.

Setiap instansi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik agar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan kebersihan jalan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi bidang dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri, sehingga petugas sapuan jalan dibentuk

untuk kebersihan jalan di Kota Kediri. Sampah yang berasal dari jalan raya, yaitu berasal dari pembersihan jalan yang umunya terdiri dari kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik dan sebagainya.

Sebelum masuk tahun anggaran 2018, dalam satu hari setiap petugas sapuan menyapu jalan pada pagi dan sore hari. Dengan teknis kerja menyapu pagi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan selesai pekerjaan, sedangkan sore hari mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi mengungkapkan bahwa teknis kerja sapuan jalan tersebut masih kurang efisien dan kurang produktif.

Pemreintahan daerah melalui DLKHP kota kediri dalam meningkatkan kinerja pelayanan persampahan terkait dengan Teknis kerja sapuan jalan yang baru adalah petugas sapuan hanya bekerja selama 4 jam dan harus berada di tempat dalam kurun waktu tersebut, selain itu beban kerja sapuan ditambah sesuai standar yang sudah diukur dan dihitung berdasarkan jumlah luas jalan yang disapu dibagi dengan sumber daya manusia (SDM) petugas sapuan jalan yang ada di Kota Kediri. Secara khusus, gagasan baru teknis kerja sapuan jalan tersebut bertujuan untuk:

- Terwujudnya Kebersihan Ruas Jalan di Wilayah Kota Kediri;
- Pemerataan Beban Kerja Atas Lokasi Pembersihan Ruas Jalan;
- Optimalisasi Tugas, Tanggung Jawab dan Hasil atas Lokasi yang Dibersihkan;
- Efisiensi Waktu dan Biaya, dikarenakan 1 (satu) kali shift kerja dalam sehari.
- Mempermudah dalam Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kinerja pelayanan sapuan jalan diawali dengan penghitungan jumlah luas jalan yang dilakukan secara manual dan dibagi per kecamatan, hal ini



dilakukan agar lebih mudah dan valid dalam pembagian beban kerja sapuan jalan dan personil petugas sapuan jalan. Pengukuran dimulai dari trotoar sampai dengan berem tanah maupun aspal yang disapu petugas dari sisi kanan dan kiri jalan. Setelah dapat ditemukan bawahkinerja pelayanan berjumlah keseluruhan luas jalan dan personil sapuan maka standar pengukuran beban kerja sapuan jalan dapat dianalisa data sebagai berikut yang dapat terperinci:

### 1. Luas Ruas Jalan : \_\_\_\_\_

- Jumlah Ruas Jalan Yang Dibersihkan = 71 Unit
- Luas Jalan = 276.289,06 M<sup>2</sup>
- Jumlah Armada Tossa = 16 Unit

### 2. Data Kepegawaian : \_\_\_\_\_

- Petugas Sapuan Jalan dan Tossa :
  - Tenaga Kontrak = 150 Orang
  - Pegawai Negeri Sipil = 36 Orang
  - Total = 186 Orang
- Mandor/ Pengawas Sapuan :
  - Pegawai Negeri Sipil = 10 Orang
  - Total Pegawai yang Bertugas di Lapangan = 196 Orang

### 3. Beban Kerja : \_\_\_\_\_

#### I. Beban Kerja Petugas

Sapuan Jalan:

- Jumlah Luas Ruas Jalan yang Disapu = 276.289,06 M<sup>2</sup>
  - Jumlah ½ Petugas Khusus Sapuan Jalan = 86 Orang
  - Beban Kerja Petugas Sapuan = Beban Kerja Petugas Sapuan Jalan.
- 
- Jumlah ½ Petugas Khusus Sapuan Jalan  
= 276.289,06 M<sup>2</sup>  
86 Orang

$$= 3.212,66 \text{ M}^2/\text{Orang}$$

#### II. Beban Kerja Petugas

Operasional Kendaraan

Tossa

- Luas Ruas Jalan = 276.289,06 M<sup>2</sup>

- Jumlah Armada

Tossa = 16 Unit

- Beban Kerja Petugas = 276.289,06 M<sup>2</sup>

Operasional = 16 Unit

$$= 17.268,07 \text{ M}^2/\text{Unit}$$

(Sumber : Dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri)

Berdasarkan urian diatas menjelaskan standar luas sapuan jalan yang sudah diukur, setiap petugas harus menuntaskan beban kerja sapuan jalan seluas ± 3.212,66m<sup>2</sup>/orang dalam sehari. Setelah standar pengukuran beban kerja sapuan jalan dapat ditemukan maka dapat dibagi untuk setiap petugas sapuan di wilayah per kecamatan. Agar kinerja pelayanan petugas sapuan lebih maksimal maka pihak dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri juga membuat standar oprasional prosedur (SOP) untuk mendukung pelayanan sapuan jalan dikota kediri. Sehingga target kinerja pelayanan sapuan jalan sudah mendukung kualitas pelayanan kebersihan secara efesien di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri.

#### Dukungan Alat Pengangkut Sampah.

Sistem pengelolaan persampahan tentu membutuhkan alat pengangkutan yang memadai untuk mengangkut sampah dari sumber menuju TPS dan dari TPS menuju TPA. Pengangkutan sampah dimaksudkan sebagai kegiatan operasi dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampah ke TPA atau TPST pada pengumpulan dengan pola individual langsung



atau dari tempat pemindahan (Transfer Depo, transfer station), penampungan sementara (TPS, TPS3R) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pembuangan akhir (TPA). Kinerja pelayanan pengangkutan sampah dari sumbernya menuju TPS dapat berupa gerobak sampah dan tossa. Demikian halnya dengan dump truck dan armroll yang digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS/TPS 3R/UDPK menuju TPA.

Kinerja pelayanan pengangkutan sampah seperti gerobak sampah digunakan sebagai alat pengangkutan sampah dari permukiman, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan pasar menuju TPS. Kinerja pelayanan dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota Kediri telah menganggarkan 24 unit gerobak sampah. Alat pengangkut gerobak sampah tersebut telah di distribusikan ke beberapa kelurahan dan sekolah berdasarkan surat permintaan yang diajukan oleh masing-masing instansi tersebut. Seperti pengumpulan sampah dan fasilitas umum dan sapuan jalan dengan menggunakan alat pengangkutan sampah (Kendaraan Roda Tiga). Jumlah kendaraan roda tiga yang di miliki oleh dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota Kediri sebanyak 21 Unit dan rata-rata kondisi lain jalan tossa tersebut berkisar 50% sebab telah berumur lebih dari 10 tahun.

Alat pengangkut sampah seperti *dump truck*, dan *arm roll*, atau *container* pengangkut sampah menuju TPA Klotok Kediri yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri, sebanyak 12 unit *dump truck* dan 6 unit *arm roll* dioperasikan untuk mengangkut sampah dari TPS/TPS3R/UDPK ke TPA yang berlokasi di Klotok Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoarjo. Alat pengangkutan tersebut melayani 42 unit TPS, 4 unit UDPK dan 2 unit TPS 3R tersebar di seluruh Kota Kediri.

Kinerja pelayanan alat pengangkutan sampah di Kota Kediri, rata-rata *dump truck*, dan *arm roll*, atau *container* diperoleh pada tahun 1993 s/d tahun 2007 dan Jarak yang tempuh armada tersebut maksimal  $\pm 120$  km/hari dan minimal  $\pm 30$  km/hari. Ketepatan waktu pengangkutan sampah dilakukan dari jam 05.00 sampai dengan jam 14.00 WIB. Rata-rata truk-truk sampah memulai aktivitas pengangkutan berangkat dari Pool kurang lebih dari jam 05.00 WIB–08.00 WIB. Aktivitas pembuangan di TPA Klotok Kediri berlangsung sampai dengan jam 14.00 WIB dan waktu kedatangan kembali truk-truk pengangkut di Pool yaitu kurang lebih dari jam 10.00 WIB sampai jam 12.00 WIB. Waktu rata-rata dalam satu kali pengangkutan adalah 4 jam/trip.

Kinerja kebijakan pelayanan alat pengangkut sampah yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri saat ini kurang memadai untuk di Operasionalkan dalam proses pengelolaan persampahan. Kinerja pelayanan alat pengangkutan sampah di Kota Kediri saat ini 65% alat pengangkutan telah dioperasikan lebih dari 15 tahun dan kondisi kendaraan saat ini rusak dan tidak efisien untuk di operasionalkan. Kondisi tersebut tentu saja akan menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya: Pengelolaan sampah tidak dapat berjalan secara efisien dan efektif, Penggunaan waktu kerja yang tidak efisien, Penggunaan kapasitas muat kendaraan yang tidak tepat, dan Rute pengangkutan yang tidak efisien, serta tingkah laku petugas dan Aksesibilitas yang kurang baik. Seperti Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini daftar Kondisi Kendaraan *Dump Truck* dan *Arm Roll Truck*, *container* di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri Tahun 2018. (Yenik, et al, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 02, February 2019).



**Tabel 1 :** Daftar Kondisi Kendaraan Dump Truck dan Arm Roll Truck Tahun 2018

No.	Merk/Type	Roda 4	Tahun	Nopol	Kondisi Kendaraan
1.	Daihatsu/V82rh	Arm Roll	1999	AG 8078 AP	45%
2.	Daihatsu/V82rh	Arm Roll	1998	AG 8073 AP	50%
3.	Daihatsu/V82rh	Dump Truck	1998	AG 8072 AP	50%
4.	Daihatsu/V82rh	Arm Roll	1998	AG 8071 AP	50%
5.	Daihatsu/V82rh	Truck	1994	AG 8080 AP	45%
6.	Daihatsu/V82rh	Dump Truck	1993	AG 8069 AP	50%
7.	Hino	Arm Roll	2012	AG 8112 AP	45%
8.	Isuzu Nkr 71	Dump Truck	2006	AG 8019 AP	70%
9.	Isuzu Nkr 71	Dump Truck	2006	AG 8016 AP	70%
10.	Isuzu Nkr 71	Arm Roll	2006	AG 8010 AP	50%
11.	Isuzu Nkr 71	Arm Roll	2006	AG 8009 AP	60%
12.	Isuzu Nkr 66	Dump Truck	2003	AG 8056 AP	60%
13.	Isuzu Nkr 71 B2	Dump Truck	2007	AG 8025 AP	70%
14.	Isuzu Nkr 71 E2-2	Dump Truck	2014	AG 8132 AP	80%
15.	Isuzu Nkr 71 E2-2	Dump Truck	2014	AG 8133 AP	75%
16.	Isuzu	Dump Truck	1992	L 9984 V	30%
17.	Toyota Dyna Ryno By 43	Dump Truck	2000	AG 8085 AP	45%
18.	Toyota Dyna Ryno By 43	Dump Truck	2000	AG 8086 AP	50%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Kediri

Dari studi dokumenter diperoleh data yang menunjukkan informasi mengenai spesifikasi jumlah Personil kebersihan dan sarana transportasi di Dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2 :** Jumlah Personil Kebersihan Pada Tahun 2018

No	Bagian / Tugas	Jumlah /Orang
1.	KEBERSIHAN ( Kantor )	23
2.	SAPUAN	192
3.	TPA	24
4.	UDPK BANJARAN	10
5.	UDPK KALIOMBO	9
6.	UDPK GROSIR	5
7.	TPS	90
8.	SATGAS	28
9.	SOPIR	26
10.	SALURAN	42
11.	RETRIBUSI	24
	JUMLAH	473

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Kediri

Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa jumlah personil kebersihan di Dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri keseluruhan berjumlah 473 orang status pegawai personil kebersihan. Sehingga dibagi dengan jumlah personil kebersihan (dikantor

berjumlah 23 orang, petugas ini khusus membersihkan di area perkantoran lingkungan dinas kebersihan sendiri dan jumlah personil kebersihan pelayanan petugas sapuan jalan sebanyak 192 orang, petugas sapuan jalan ini turun kelapangan untuk membersihkan jalan-jalan di wilayah Kota Kediri. Selanjutnya jumlah petugas personil kebersihan di TPA sebanyak 24 orang, petugas TPA melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA). Selanjutnya jumlah personil UDPK banjaran sebanyak 10 orang yang di TPS banjar, Petugas ini mengelola sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien, dan hasil pengolahan sampah organik berupa kompos digunakan untuk pupuk tanaman hias dan herbal yang ditanam di lahan sekitar TPS untuk dijual. Selanjutnya jumlah personil UDPK Kaliombo sebanyak 9 orang, yaitu tempat pengolahan sampah yang menggunakan sistem *reduce reuse recycle* atau dikenal *TPS3R* dan jumlah personil kebersihan UDPK Grosir sebanyak 5 orang. Selanjutnya jumlah personil TPS sebanyak 90 orang, TPS ini tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan dan jumlah personil SATGAS sebanyak 28 orang, jumlah personil kebersihan sopir angkut sampah menuju TPS3R ke TPA sebanyak 26 orang, jumlah personil kebersihan saluran sebanyak 42 orang dan jumlah personil kebersihan pelayanan Retribusi 24 orang, Petugas pelayanan retribusi menagih melakukan pendataan wajib retribusi/pelanggan dengan selalu berkoordinasi dengan petugas pengangkutan sampah. Petugas kebersihan penagih melakukan penagihan retribusi kepada wajib retribusi/pelanggan dengan menggunakan kartu pelanggan dan menempelkan stiker pelanggan ke masing-masing rumah, kantor sekolah dan fasilitas umum lainnya.





Tabel 2 : Sarana Kendaraan Pengangkutan Persampahan Pada Tahun 2018

Pengangkutan Sampah	Jumlah
Dump Truck	12 UNIT
Amroll Truck	6 UNIT
Roda Tiga/Tossa	15 UNIT
Whelloader	1 UNIT
Bulldozer	1 UNIT

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Kediri

Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa kinerja kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kediri, menunjukkan bawah indikator *Input* Pola pengangkutan sampah di Kota Kediri berdasarkan kapasitas kendaraan seperti *kontainer, trailer truck, dumptruck, armrolltruck dan gerobak motor roda tiga*, yang memiliki bak ukuran medium untuk menampung sampah dari rumah tangga sebagai alat pendukung kinerja pengelolaan sampah, Di harapkan dengan adanya optimassi ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam rangka peningkatan pelayanan sistem pengangkutan sampah di Kota Kediri. Pola pengangkutan sampah daerah yang dilayani tersebut umumnya adalah lingkungan pemukiman yang sudah teratur, daerah pertokoan, tempat-tempat umum, jalan dan taman. Kemudian petugas DLHKP memindahkan sampah yang sudah di angkut dengan gerobak atau mobil sampah, kemudian di masukkan ke *dump truk*, untuk selanjutnya baru dibawa ke TPS/ TPA Kota Kediri

Selanjutnya di bidang penyediaan sarana dan prasarana alat pengangkutan sampah seperti, *Sapu, Cakar, Serok dan Sekop* dan tersediannya seperti gerobak sampah, container sampah, mesin pencacah sampah, mesin pencacah plastik,

mesin pengayak kompos, dan tong sampah, untuk mendukung kinerja tenaga lapang khususnya dalam pengangkutan sampah. Sehingga pengangkutan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Bahwa kebijakan Pemerintah daerah melalui di DLHKP Kota Kediri sudah sesuai PERDA N0. 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri. Berdasarkan peraturan tersebut sangatlah penting untuk menguatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan di Kota Kediri.

### KESIMPULAN

1. Kinerja kebijakan pemerintah daerah di Kota Kediri dalam meningkatkan kualitas pelayanan sapan jalan masih belum maksimal/teknis kerja sapan jalan tersebut masih kurang produktif. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan sampah Kota Kediri dilihat dari faktor sumber daya manusia (SDM), teknik operasional, regulasi, dan pembiayaan. dan disebabkan juga dari faktor eksternal yaitu dari faktor sosial, demografi, politik, teknologi, masyarakat, culture, dan regulasi. Sehingga Hal ini masih banyaknya peraturan dan program-program 3R dari kebijakan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga standar kinerja pelayanan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri belum bisa dikatakan secara efisien dan efektif.
2. Kinerja kebijakan pelayanan pengangkutan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, menunjukkan bawah indikator kinerja pelayanan pengangkutan sampah tidak dapat berjalan secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan penyediaan sarana prasarana di dinas lingkungan hidup kebersihan



dan pertamanan Kota Kediri masih terbatasnya peralatan seperti kontainer, dan dump truck, arm roll truck alat pengangkutan sampah yang tidak efektif juga akan mempengaruhi jangkauan pelayanan maupun biaya oprasional pengangkutan sampah. Serta alat pengangkutan yang tidak layak jalan apabila tetap dipersonalkan tentu akan mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James A. 1975. *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Dye, Thomas R, 1987. *Understanding Public Polic*, (Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc).
- Depdagri-LAN.2007. Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Service Delivery, Accountability and Quality Management). Jakarta LAN.
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. (1996). *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2002, *Perspektif Perilaku Birokrasi*. 2 jld, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan aplikasi di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Peraturan Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/26/M.PAN/05/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetesi Antar Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kota Kediri N0. 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Kota Kediri.
- Putri, Rizca Yunike. The Village Governance Model That Empowers Communities In Indonesia's Border Areas. *Journal of Urban Sociologi* Volume 2 No 1 Tahun 2019.
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Diterbitkan Oleh; BPFE - Yogyakarta.
- Yenik Pujowati, Andy Fefta Wijaya, Bambang Santoso and Soesilo Zauhar, Management Policy In Kediri City The Effectiveness Of The Performance Of Community Based 3r Waste. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*. Volume 10, Issue 02, February 2019, pp.1726–1732, Article ID: IJMET\_10\_02\_178.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.